



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 233/16122008
HARI : SELASA
TANGGAL : 16 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Krisis Ekonomi Makin Memburuk di Asia Tahun Depan	3
	THAILAND: Pemimpin Oposisi Jadi Perdana Menteri	3
	ASEAN Charter ushers in historic new era for region	4
	BUSH DILEMPARI SEPATU "Tanda Perpisahan dari Rakyat Irak"	5
	Malaysia Akan Stop Tenaga Kerja Asing	5
	Negara Anggota Akan Tunjuk Perwakilan Tetap Asean	6
	Tough corruption battle in Asia despite campaigns	7
	FTA Asean dan 3 negara ditunda	9
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Ketua DPR Tidak Keberatan "Dipereteli"	9
	B. EKONOMI	
	Dunia Usaha Sambut Positif Turunnya Harga BBM	10
	Pengaturan Impor Direvisi Lagi	10
	Lembaga Pembiayaan Ekspor Segera Terbentuk	11
	C. SOSBUD	
	Mengunjungi "Kantor Kelurahan"	12

	D.	HANKAM	
		Indonesia-AS Tukar Pikiran Soal Perencanaan Pertahanan	13
	E.	HUKUM	
		DPR Sahkan RUU Minerba pada Selasa	14
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Pemerintah Diminta Antisipasi Penerapan "Lacey Act" Amerika	14
	III.	ARTIKEL	
		Annapolis has made peace impossible (by Nicola Nasser)	15
		Zero Toleransi Melamin, Nonsens (Oleh Mangku Sitepoe)	16
		Indonesia can face this crisis with confidence (by Johannes Simbolon)	18
	IV.	LAIN-LAIN	--
	V.	EDITORIAL	
		Teror atas Hubungan India-Pakistan	19

Jakarta, 16 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Krisis Ekonomi Makin Memburuk di Asia Tahun Depan

Krisis ekonomi akan semakin memburuk di Asia pada 2009, seiring dengan merosotnya ekspor dari negara-negara Barat yang dilanda resesi, namun kondisi kawasan itu masih akan lebih baik ketimbang AS dan Eropa, para analis menyatakan.

Harapan Asia akan relatif lebih kebal terhadap krisis finansial global yang berasal dari AS meredup pada 2008, saat merosotnya permintaan di AS dan Eropa dirasakan di berbagai pabrik di seluruh benua itu.

Bahkan China, yang belakangan ini masih menikmati pertumbuhan dua digit, juga mengalami pukulan keras, dengan ekspor merosot untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun belakangan ini pada bulan lalu.

Prospek bagi Asia akan sangat, sangat keras," kata Glenn Maguire, ekonom utama Asia pada Societe Generale di Hongkong.

Data terakhir memperlihatkan perekonomian Asia "tak hanya melambat pada kuartal keempat, tetapi tergelincir," katanya kepada AFP.

Kami percaya resesi di Asia akan terjadi pada 2009, dengan pengecualian China, yang berada dalam posisi menggunakan kebijakan yang lebih keras untuk mendukung pertumbuhan," tutur Maguire.

Kuartal pertama 2009 akan menjadi periode terkeras bagi kawasan itu, seiring dengan dilakukannya pengurangan produksi dan pemangkasan lapangan kerja untuk menghadapi pelembaran ekonomi," kata para pakar.

Namun demikian, terulangnya krisis finansial Asia 1997 jilid dua dianggap sebagai hal yang tak mungkin terjadi.

Bank-bank Asia sebagian besar selamat dari sekuritas hipotek yang bermasalah, tak seperti banyak bank di Barat, sementara negara-negara Asia telah memiliki cadangan devisa yang besar untuk menghadapi kemungkinan melemahnya mata uang mereka. (ANTARA)

2. THAILAND: Pemimpin Oposisi Jadi Perdana Menteri

Parlemen Thailand memilih pemimpin oposisi Abhisit Vejjajiva sebagai perdana menteri baru pada Senin. Dia mengalahkan mantan Kepala Polisi Nasional Thailand Pracha Promnok yang dikenal sebagai loyalis mantan PM Thaksin Shinawatra.

Abhisit, lulusan Oxford yang memimpin Partai Demokrat, unggul dengan perolehan 235 suara. Sedangkan Pracha mendapat 198 suara. Pemilihan perdana menteri baru ini dilakukan menyusul demonstrasi antipemerintah dan anti-Thaksin yang mengakibatkan jatuhnya PM Somchai Wongsawat.

Majelis Rendah Parlemen Thailand normalnya beranggotakan 480 orang. Namun karena masa liburan, jumlah anggota yang hadir dalam pemilihan itu hanya 437 orang. Seorang anggota parlemen meninggal pada saat pemungutan suara dilakukan.

Ratusan pendukung Thaksin berusaha menghalangi gerbang parlemen dalam upaya mereka menolak hasil pemilihan tersebut. Satuan polisi antihuru-hara akhirnya diterjunkan untuk memberikan jalan bagi anggota parlemen.

Seusai pemilihan, Abhisit (44)--salah seorang pemimpin muda yang mengepalai pemerintahan--mengucapkan terima kasih kepada anggota parlemen dan publik. Namun dia mengatakan tidak akan membicarakan politik sampai secara resmi mendapat pengesahan dari Raja Bhumibol Adulyadej.

Hasil pemilihan itu menunjukkan bahwa Partai Demokrat kembali berkuasa setelah tujuh tahun menjadi oposisi, menyusul kemenangan partainya Thaksin, Thai Rak Thai, pada pemilihan 2001 lalu.

Pemilihan ini dilakukan setelah PM Somchai Wongsawat kehilangan kursi PM berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2 Desember lalu. Mahkamah Konstitusi membubarkan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Somchai, partai terkemuka bekas pemerintah koalisi yang dibentuk September lalu, karena tuduhan kecurangan dalam pemilu.

Somchai adalah saudara ipar Thaksin dan dianggap sebagai kepanjangan tangan Thaksin, yang kini berada di pengasingan setelah kudeta militer 19 September 2006--yang menumbangkannya dari kursi perdana menteri.

Thailand selama berbulan-bulan dicekam serangkaian demonstrasi antipemerintah yang dijalankan PPP, yang puncaknya adalah aksi pendudukan dua bandara di Bangkok dan menyebabkan ratusan ribu penumpang telantar.

KTT ASEAN

Menyoal KTT ASEAN yang sedianya dilakukan di Thailand pada pertengahan Desember, Abhisit mengaku ingin agar KTT digelar di Bangkok pada Februari 2009.

Thailand pada awal Desember ini menunda pelaksanaan pertemuan ke-10 anggota ASEAN itu sampai Maret. Ini karena aksi blokade terhadap bandara di Bangkok oleh massa rakyat antipemerintah.

Pemerintahan sebelumnya juga memindahkan KTT ASEAN ke-14 itu ke kota utara Chiang Mai karena kemelut politik yang melanda Thailand, yang merupakan Ketua ASEAN sekarang.

"Saya akan mendesak dilaksanakannya KTT ASEAN pada Februari karena pada akhir Januari adalah Tahun Baru China. Dan saya mungkin tidak akan memilih Chiang Mai sebagai tempat berlangsungnya pertemuan," kata Abhisit kepada para wartawan.

"Sejauh yang saya tahu, ada banyak problem jika kami menyelenggarakan pertemuan di Chiang Mai," tuturnya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, namun Chiang Mai terkenal sebagai basis pertahanan pemerintahan Thaksin.

ASEAN terdiri dari Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. (Suara Karya)

3. ASEAN Charter ushers in historic new era for region

The much-awaited ASEAN Charter entered into force on Monday, propelling the 41-year-old regional bloc into a new era in which new law-empowered bodies will seek to integrate the member countries and uphold democracy.

The signing was officiated in Jakarta during a meeting of ASEAN foreign ministers a month after Thailand became the last member to ratify the charter.

"Regional cooperation and economic integration to build the ASEAN Community will actually shift into higher gear after the ASEAN Charter enters into force today," ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan said.

The historic document, signed by ASEAN leaders last year, stipulates rules for its members and unites the geographical bloc of 10 countries and half a billion people into a legalized body that can threaten its members with sanctions.

The charter seeks to integrate the region's security forces, economies and socio-cultures by 2015.

Critics of the charter have emphasized the absence of nonconsensus decision-making mechanisms and for the vagueness of stipulated sanctions for noncompliance, which state only that any impasse will be brought to the summit of ASEAN leaders.

Doubts have also been raised over the proposed ASEAN human rights body, which is expected to lack powers of prosecution.

Myanmar — ASEAN's youngest member — has proven to be a thorn in the side as its military junta continues to detain democracy activists, including Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi and hundreds of political opponents, to affirm its iron grip on the country.

"What ASEAN members have learned is that in this time of globalization, there is no absolute sovereignty. Ten years ago when I was foreign minister of Thailand, we couldn't even discuss the internal matters of each member. Now we can express concerns, give warnings, ask for explanations.

"Sanctions can be in pressure, (they) don't have to be in penalties," said Pitsuwan, adding that the charter sought to match the grouping's noninterference principle and the current era of inter-state relations.

In his opening remarks at the meeting, President Susilo Bambang Yudhoyono said the charter meant ASEAN members were "bound more than ever before to settle our differences in an amicable manner".

"For a charter will serve its purpose if, and only if, member states faithfully implement in letter and in spirit all its provisions and stipulations," he said.

The charter had been planned to be officiated during a summit in Thailand this month, but the meeting was rescheduled due to the political crisis in Bangkok.

A new summit has been scheduled to be held in Thailand from Feb. 24-26, Pitsuwan said, with the hope that the political turmoil would have eased by then, and with Monday's election of a new premier.

An auxiliary meeting of finance ministers will be held in Indonesia in January to discuss the Chiang Mai Initiative on bilateral currency swaps between ASEAN and its dialogue partners China, Japan and South Korea.

ASEAN groups Indonesia, Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. (The Jakarta Post)

4. BUSH DILEMPARI SEPATU "Tanda Perpisahan dari Rakyat Irak"

Seorang wartawan Irak melemparkan sepatunya ke arah Presiden AS George W Bush, namun tidak mengenainya. Seperti tampak di layar televisi, Presiden George Bush mampu mengelak dari lemparan sepatu itu. Insiden ini terjadi saat Bush tengah memberikan keterangan pers bersama Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki, di Baghdad, Minggu.

Kedua pemimpin itu sebelumnya bertemu di kantor Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan ditandai dengan penyampaian pernyataan bersama di hadapan sejumlah wartawan. Seorang wartawan yang duduk di barisan ketiga tiba-tiba meloncat sambil berteriak: "Ini tanda perpisahan dari rakyat Irak, anjing!". Teriakan ini diiringi lemparan sepatunya satu per satu ke arah Bush.

PM Maliki segera memberikan isyarat agar Bush segera berlindung. Bush pun membungkuk sehingga luput dari lemparan sepatu.

Wartawan itu, Muntazer al-Zaidi, yang bekerja untuk saluran TV Al-Baghdadia yang bermarkas di Kairo, segera dibawa keluar ruangan oleh aparat keamanan.

Dalam budaya Arab, tapak sepatu dianggap sebagai penghinaan. Setelah patung Saddam Hussein dirobokkan di Baghdad pada April 2003, banyak orang memukuli wajah patung itu dengan tapak sepatu mereka.

Menyusul insiden pelemparan sepatu ini, sejumlah wartawan Irak berdiri untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bush. Bush sendiri lantas berseloroh dengan mengatakan: "Terima kasih karena meminta maaf atas nama orang Irak. Hal itu tidak mengganggu saya. Yang bisa saya katakan adalah, itu sepatu ukuran 10 yang dilemparkannya..."

Dengan meremehkan insiden itu, Bush kemudian dengan tenang mengatakan, "Saya tidak tahu apa masalah orang itu... Tapi saya tidak merasa terancam sama sekali."

Dalam pertemuan itu, Bush dan Maliki juga menandatangani fakta baru mengenai keamanan kedua negara. Pakta itu menyebutkan bahwa pasukan AS akan meninggalkan Irak pada 2011, delapan tahun setelah invasi militer pada 2003.

Presiden Bush sendiri terbang ke Irak dalam kunjungan mendadak yang dilakukan pada Minggu. Dia menilai intervensi AS di Irak sulit namun penting.

"Pekerjaan itu tidak mudah, namun itu penting bagi keamanan Amerika, harapan Irak dan perdamaian dunia," kata Bush saat bertemu dengan Presiden Irak Jalal Talabani.

Masalah penting bagi AS saat ini adalah bagaimana tepatnya menarik pasukan dalam tiga tahun ke depan dan menjadikan Irak sebagai negara yang stabil.

Media massa AS menerbitkan rincian laporan pemerintah mengenai proses pembangunan kembali pasca-invasi yang dilumpuhkan oleh perang birokratik dan ketidakpedulian terhadap elemen mendasar masyarakat Irak.

Menurut Bush, yang lima minggu lagi akan menyerahkan jabatannya kepada Barack Obama, perang di Irak belum berakhir dan masih banyak tugas yang harus dilakukan.

Lawatannya yang tidak diumumkan itu dilakukan sehari setelah Menteri Pertahanan AS Robert Gates mengatakan kepada pasukan AS bahwa misi Irak berada dalam "tahap akhir". (Suara Karya)

5. Malaysia Akan Stop Tenaga Kerja Asing

Pemerintah Malaysia mempertimbangkan untuk membekukan pemberian izin bagi pekerja asing, seiring meningkatnya angka pengangguran di negara tersebut.

Langkah itu juga terkait dengan pernyataan Singapura bahwa negara tersebut mungkin memulangkan ribuan tenaga kerja asing yang bekerja di sana. Direktur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Malaysia Ismail Abdul Rahim seperti dikutip Bernama mengatakan, pembekuan izin kerja merupakan salah satu upaya pemerintah Malaysia untuk menahan kenaikan angka pengangguran.

"Langkah ini adalah salah satu opsi yang tengah dikaji secara aktif dalam rangka membantu penduduk lokal yang terkena pemutusan hubungan kerja untuk dapat kembali dipekerjakan," tuturnya kepada kantor berita tersebut kemarin. Data resmi menunjukkan bahwa saat ini terdapat 2,1 juta tenaga kerja asing yang bekerja di Malaysia.

Kebanyakan di antaranya berasal dari Indonesia dan Filipina, yakni mencapai 20% dari keseluruhan tenaga kerja asing di Malaysia. Bahkan, menurut sejumlah organisasi nonpemerintah Malaysia, jumlah tenaga kerja asing yang ada di Negeri Jiran itu bisa dua kali lipat dari angka resmi, jika imigran gelap ikut diperhitungkan.

Pemerintah Malaysia memperkirakan angka pengangguran di negara berpenduduk 27 juta jiwa tersebut mencapai 3,3% hingga akhir tahun ini. Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun menjadi hanya 3,5% pada 2009, dari perkiraan 5,5% tahun ini.

Di sisi lain, pengiriman uang oleh para tenaga kerja di luar negeri memegang peranan amat penting bagi perekonomian sejumlah negara seperti Filipina, yang mengandalkan pemasukan dari tenaga kerjanya di luar negeri untuk membiayai defisit anggaran belanja negaranya. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 8 juta warga negara Filipina bekerja di luar negeri.

Dari situ, jumlah uang yang dikirimkan ke negara asalnya per bulan mencapai lebih dari USD1 miliar, atau sekitar 10% dari output ekonomi negara tersebut. Di posisi kedua, PBB menempatkan Indonesia sebagai negara penyuplai tenaga kerja terbesar di Asia, dengan 2,7 juta pekerja di luar negeri. Selanjutnya adalah Myanmar, yang menyuplai sekitar 1,8 juta pekerja ke berbagai negara. (Koran Sindo)

6. Negara Anggota Akan Tunjuk Perwakilan Tetap Asean

Negara-negara ASEAN akan menunjuk perwakilan tetap bagi kantor Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk meningkatkan kinerja ASEAN.

"Negara ASEAN akan menunjuk perwakilan tetapnya untuk mempermudah mekanisme kerjasama dengan Sekretariat ASEAN di Jakarta dan menerapkan berbagai kesepakatan kerja sama," kata Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan di Jakarta, Senin, se usai acara pengesahan pemberlakuan Piagam ASEAN.

Menurut Surin, keberadaan perwakilan tetap masing-masing negara anggota untuk ASEAN akan memperpendek birokrasi dan waktu yang dibutuhkan negara-negara ASEAN guna mencapai konsensus bersama.

"Perwakilan tetap itu yang akan bertanggung jawab atas urusan koordinasi dengan pemerintah pusat masing-masing," katanya.

Kebijakan pembentukan Komite Perwakilan Tetap itu merupakan salah satu komitmen bersama negara-negara anggota ASEAN yang disepakati dalam Piagam ASEAN selain Badan HAM dan Dewan Komunitas.

Selain penunjukan perwakilan tetap, Piagam ASEAN juga mengatur pertemuan tingkat menteri ASEAN menjadi dua kali setahun.

"Hari ini adalah untuk pertama kalinya para menteri (Menlu) ASEAN melakukan pertemuan dewan koordinasi bersama," ujarnya.

Dalam upaya memperluas peran dari Sekretariat ASEAN, kata dia, Sekretaris Jenderal ASEAN yang mula-mula hanya dibantu oleh dua wakil akan dibantu oleh empat wakil yang membawahi masalah politik, ekonomi, sosial-budaya dan sekretariat.

Dengan adanya perluasan peran dan fungsi Sekretariat ASEAN, lanjut dia, pemerintah Indonesia melalui Menlu Hassan Wirajuda telah menjanjikan untuk meningkatkan bantuan fasilitas terhadap Sekretariat ASEAN berupa penambahan gedung baru.

Pada kesempatan itu Surin juga mengatakan bahwa syarat dan ketentuan Badan HAM ASEAN akan dibahas dalam pertemuan tingkat Menlu ASEAN pada Juli 2009.

Acara pengesahan pemberlakuan Piagam ASEAN yang telah dinantikan selama 41 tahun oleh negara-negara ASEAN selain dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri, Indonesia), Mohamed Bolkiah (Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, Brunei Darussalam), Kao Kim Hourn (Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Kamboja), Bounkeut Sangsomsak (Wakil Menlu, Lao PDR), Rais Yatim (Menlu, Malaysia), U Nyan Win (Menlu, Myanmar), Alberto G. Romulo (Menlu, Filipina), George Yeo (Menlu, Singapura), Mun Patanotai (Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi, Thailand), dan Pam Gia Khiem (Wakil PM/Menlu, Vietnam).

Pada acara tersebut, selain bersulang untuk merayakan pengesahan pemberlakuan Piagam ASEAN, para tokoh ASEAN itu juga mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa-jasa diplomat senior Indonesia yang juga mantan Menlu Ali Alatas yang meninggal pekan lalu.

Ali Alatas dikenal memiliki komitmen yang besar bagi ASEAN. Dia merupakan perwakilan Indonesia dalam merumuskan Piagam ASEAN. (ANTARA)

7. Tough corruption battle in Asia despite campaigns

Fugitive former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra is looking for an exile home to avoid a prison sentence for corruption. An ex-Indonesian central bank chief has been sent to jail for five years on corruption charges.

Malaysia's ruling party is shaken to its foundations after voters lift the opposition to unprecedented gains on a groundswell of revulsion over patronage and corruption. Philippine President Gloria Arroyo dodges impeachment over deals with China that were canceled due to suspected graft.

For years, corruption has greased the wheels of commerce and politics in Southeast Asia, a favored destination for investors in emerging markets.

Today, government leaders across the region are on the defensive over corruption issues. Anti-graft campaigns have acquired momentum. Empowered anti-corruption bodies are cracking down. Invigorated judiciaries are prosecuting the miscreants.

Companies looking at tempting but unfamiliar markets are also waking up to corruption risks to avoid costly penalties and to protect their brand names.

So have things really improved?

Actually, not a whole awful lot, experts say.

INDONESIA MUCH BETTER

Global corruption watchdog Transparency International has found little discernible change in the emerging markets of Southeast Asia in its 2008 table of perceived corruption. Indonesia has significantly improved. Malaysia and the Philippines have slipped a few rungs. Thailand is more or less the same, while others such as Cambodia and Myanmar are wallowing at the bottom of the league tables.

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, perhaps with an eye on elections next year, has cranked up an anti-graft campaign in a country long viewed as among the most corrupt in the world. Not only was former Bank Indonesia governor Burhanuddin Abdullah jailed for bribing members of parliament, the president's own son-in-law was questioned in the scandal.

The five-year-old Indonesian Corruption Eradication Commission, has acquired something of a cult status in the world's fourth-most populous nation. Last month, it signed an agreement with the FBI for help with training and investigation.

Fauzi Ichsan, an economist with Standard Chartered Bank in Jakarta, said corruption is no longer seen as one of the main barriers to foreign investment in Indonesia. "The government's anti-corruption campaign has been quite revolutionary," he said.

What concerns foreign investors the most is not the run-of-the-mill bribes that must be paid to get a phone installed or a shipment through customs -- some developed countries even allow companies to take tax deductions for these "facilitation payments" -- but institutionalised corruption.

"While under-the-table payments are a relatively common thing, what multinational companies object to most is crony corruption that gives special privileges to selected groups with

government connections, those winning plum government projects," says Varakorn Sarnakoses at Bangkok's Dhurakij Pundit University.

Thailand has been embroiled in three years of political chaos whose proximate cause has been allegations of crony capitalism and corruption in the administration of Thaksin Shinawatra, ousted in a 2006 coup.

Thailand's army-backed 2007 constitution now provides for political parties found guilty of electoral fraud to be dissolved. "The fact that two of our last three prime ministers have lost criminal cases should make politicians wary of being caught on the wrong side of the law," Varakorn said.

Crony corruption and political patronage is deeply embedded in neighbouring Malaysia, largely due to its system of special privileges to uplift majority Malays, especially government contracts that tend to go to well-connected tycoons.

Lame duck Premier Abdullah Ahmed Badawi, who like Yudhoyono was elected in 2004 on a clean government campaign, finally introduced anti-corruption legislation in parliament last week -- after his ruling coalition suffered its worst electoral showing since independence from Britain in 1957.

Abdul Jalil Rashid, fund manager for Aberdeen Asset Management Malaysia, calls corruption "a huge barrier" to investment in Malaysia.

"There's also lack of transparency which then leads to the perception that something is going wrong," the manager of a \$1.38 billion fund told Reuters. "If you compare Malaysia with other countries, I think it is large-scale here rather than petty."

The Philippine government has been mired in a series of scandals that the Arroyo government has failed to explain to the public. Chief among them was a botched \$329 million national broadband deal with China that was scrapped over allegations of bribery and deal-fixing involving the president's husband.

MOST FIRMS EXPERIENCE CORRUPTION

A PricewaterhouseCoopers survey of senior executives around the world found two-thirds of them had experienced some form of actual or attempted corruption in their business dealings.

Almost 80 percent of the executives said their company has some form of anti-corruption programme, but only a fifth of them were very confident that it was working.

More than half of the executives said in the August report "Confronting Corruption" that enforcement had increased over the last five years and would strengthen further in five years.

Executives said they felt particularly vulnerable when doing business in emerging markets.

"The search for new opportunities is increasingly taking companies into emerging markets ... where they confront unfamiliar business practices," the PricewaterhouseCoopers report says. "Being able to manage risk in new environments is a necessity as businesses compete globally."

Transparency International's annual "Bribe Payers Index," released last week, found that firms from emerging economic giants such as China, India and Russia are seen to be routinely engaged in bribery when doing business abroad. (Belgian, Canadian, Swiss and Dutch firms were the cleanest.)

Institutions in the region that were perceived to be most amenable to taking bribes were Indonesia's parliament, Malaysia's police, and Philippine customs agents.

The record, then, is mixed across the region. Many countries appear to be cracking down on the routine bribes and kickbacks that have long characterised business dealings in Asia. Companies, for their part, no longer see these kinds of payments as a necessary evil for doing business.

But systemic corruption, poor governance and lack of transparency continue to be significant issues.

World Bank analysts Daniel Kaufman, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi concluded in a recent study: "We certainly do not have any evidence of any significant improvement in governance worldwide, and if anything the evidence is suggestive of a deterioration, at the very least, in key dimensions such as regulatory quality, rule of law, and control of corruption."

The massive growth of international trade and globalization over the past two decades has greatly expanded opportunities for corruption, as well, and has brought new players into the fray such as multinational firms from China and India with different business cultures from that of the West.

"Through globalization, competition has increased, and so has competitive corruption." Transparency International Malaysia President Ramon Navaratnam noted in an interview.

"All is fair in love and war and business and so you have incentives for corruption." (The Jakarta Post)

8. FTA Asean dan 3 negara ditunda

Penandatanganan perjanjian kerja sama perdagangan bebas (FTA) Asean- India dan Asean-Australia dan Selandia Baru FTA diundur hingga Februari 2009.

Penundaan itu diputuskan menyusul kondisi politik di Thailand sebagai negara penyelenggara KTT Asean belum stabil.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan negosiasi Asean-Australia, Selandia Baru, dan India FTA telah selesai, tetapi belum dapat ditandatangani tahun ini. Alasannya, legalisasi beberapa dokumen terkait perjanjian ini belum dapat diselesaikan.

Selain itu, beberapa menteri tidak dapat hadir pada Asean Economic Ministers di Singapura pada 16 Desember 2008.

"Menteri dari Australia dan Selandia Baru tidak dapat datang, tetapi paling lambat ditandatangani pada Februari 2009," ujarnya saat Konferensi Pers Perkembangan Putaran Doha dan Kerja sama Ekonomi Asean.

Penandatanganan kedua kerja Asean dengan tiga negara tersebut akan dilakukan pada Februari 2009, saat KTT Asean digelar. (Bisnis Indonesia)

I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Ketua DPR Tidak Keberatan "Dipereteli"

Fasilitas Pimpinan Dewan Jauh Lebih Besar Dibandingkan Anggota

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menyatakan tak keberatan dengan semangat yang berkembang di fraksi-fraksi untuk "memereteli" kewenangan maupun fasilitas yang diterima pimpinan Dewan.

Agung merasa selama ini pun Ketua DPR tidak memiliki kekuasaan besar untuk mengeksekusi kebijakan. Tugas yang selama ini dijalankannya pun hanya sebagai juru bicara Dewan dan menyampaikan keputusan-keputusan alat kelengkapan DPR.

"Jadi, tidak masalah dipereteli, memang segitu-gitunya," papar Agung di Ruang Wartawan DPR, Senin (15/12).

Fasilitas yang diterima pimpinan Dewan pun, lanjut Agung, tidak jauh beda dengan yang diterima anggota Dewan. Gaji yang diterima pimpinan Dewan sama. Yang berbeda hanyalah mobil dinas, rumah dinas, dan protokoler.

Pernyataan itu disampaikan Agung menanggapi semangat fraksi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, fraksi-fraksi menghendaki pimpinan DPR tidak bisa lagi menentukan banyak hal. Rencana kerja dan anggaran harus dibawa ke paripurna. Menurut Nursanita Nasution dari F-Partai Keadilan Sejahtera, fasilitas pimpinan Dewan pun tidak boleh lagi jauh berbeda dengan anggota.

Menurut Agung, pengelolaan anggaran DPR selama ini banyak dieksekusi langsung oleh sekretariat jenderal tanpa sepengetahuannya.

Istri dibiayai

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo, dalam kesempatan terpisah, membantah pernyataan Agung bahwa fasilitas yang diterima pimpinan DPR tidak jauh dengan yang diterima anggota Dewan.

Djoko mencontohkan rumah dinas pimpinan DPR yang jauh lebih besar dari rumah dinas anggota Dewan. "Rumah dinas pimpinan DPR itu bisa lima kali lebih besar daripada rumah dinas anggota di Kalibata (kompleks perumahan anggota DPR) kalau dilihat dari nilainya," paparnya.

Pimpinan DPR pun mendapatkan kesempatan perjalanan dinas ke luar negeri yang sangat banyak. Istri pimpinan Dewan pun dibiayai negara untuk setiap perjalanan dinas itu.

Dari sisi protokoler, pimpinan DPR juga punya hak untuk mendapat pengawalan. Pimpinan DPR pun mendapat tunjangan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan anggota Dewan.

Staf ahli pimpinan DPR pun jauh lebih banyak, yaitu 5 sampai 6 orang, sedangkan anggota Dewan hanya satu orang.

"Jadi, fasilitas pimpinan DPR itu minim, tidak benar," ujarnya. (Kompas)

B. EKONOMI

1. Dunia Usaha Sambut Positif Turunnya Harga BBM

Penurunan harga BBM Premium dan solar disambut positif kalangan pengusaha. Kebijakan ini dianggap bisa membantu dunia usaha dari resesi global.

Wakil Ketua I Himpunan Pengusaha Penangkapan Uang Indonesia (HPPI) Isyafudin mengatakan dengan penurunan solar menjadi Rp 4.800/liter dan harga keekonomian Rp 6.710/liter, maka harga rata-rata solar menjadi Rp 6.200/liter. Meski harga ini masih jauh di atas harga biaya produksi yang ideal, yaitu Rp 5.000/liter.

"Kami menyambut gembira turunnya harga BBM. Tapi kami masih dalam kondisi sulit karena pasokan BBM selalu tersendat, terutama di kawasan Indonesia Timur," jelas Isyafudin, Senin (15/12).

Pengusaha perikanan mendapat jatah BBM bersubsidi sebanyak 25 kiloliter per bulan. Sisanya dipenuhi dari BBM dengan harga keekonomian.

Ditegaskan turunnya harga harga BBM pada akhirnya tidak akan membuat pengusaha perikanan kembali bergairah. Masalah pasokan menjadi persoalan utama di samping harga BBM yang sangat tinggi. Ketika Harga BBM keekonomian mencapai Rp 13.000/liter, biaya BBM mencapai 75 persen dari biaya operasional. Setelah penurunan, diharapkan komponen biaya BBM turun menjadi 45 persen.

Berbagai cara efisiensi dilakukan pengusaha untuk meminimalkan biaya operasi. Misalnya dengan memakai kapal-kapal asing bekas yang memang lebih hemat. Kapal eks-Australia dengan tangki 90-100 ton solar per bulan, dengan jumlah kru 9-11 orang. Kapal eks-Jepang dengan kapasitas tangki BBM lebih besar 200-250 ton solar per tiga bulan, dengan jumlah kru 22 - 28 orang. Selain itu, efisiensi juga dilakukan dari segi alat tangkap.

Lebih miris lagi, pengusaha dihadapkan pada resesi di negara tujuan ekspor. Meski belum ada yang menghentikan order, namun tanda-tanda pelemahan ekspor sudah terlihat. Negara pembeli mulai mengurangi order, ukuran produk impor diperkecil. "Setelah BBM turun ternyata hambatan masih tidak pernah putus," kata Isyafudin.

Ketua Umum Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, mengatakan, penurunan itu akan memengaruhi harga produk. Diperkirakan harga produk pangan bisa turun 5-10 persen. Akan tetapi penurunan itu sangat tergantung pada fluktuasi kurs dolar dan ongkos angkut.

"Harga produk bulan depan bisa turun, cuma kami mengharapkan kurs dolar di bawah Rp10.000 dan ongkos truk pengangkut produk pertanian turun 5 persen," kata Thomas, Senin (15/12).

Menurutnya, kalau situasi itu tidak terjadi, penurunan harga akan sulit dilakukan. Tapi pihak produk produsen tetap akan mengompensasi penurunan itu dalam bentuk hadiah, volume produk ditambah, pengantian kemasan dan kualitas diperbaiki. (Sinar Harapan)

2. Pengaturan Impor Direvisi Lagi

Suara Dunia Usaha Perlu Didengar

Pengaturan impor untuk produk garmen, alas kaki, elektronik, mainan anak, serta makanan dan minuman, yang akhir pekan lalu ditunda pemberlakuannya dari 15 Desember 2008 menjadi 1 Februari 2009, kini pemberlakuannya diubah lagi menjadi 1 Januari 2009 dengan beberapa pengecualian.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Senin (15/12), menjelaskan, pengaturan impor produk konsumsi ini untuk mengamankan industri dalam negeri dari dampak krisis agar tidak semakin parah dengan adanya serbuan impor ilegal.

Semula aturan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permenperdag) Nomor 44 Tahun 2008 yang terbit 31 Oktober 2008. Aturan ini mengharuskan impor lima jenis produk konsumsi tersebut dilakukan oleh importir terdaftar melalui lima pelabuhan yang ditentukan atau bandar udara internasional. Impor juga harus disertai verifikasi di pelabuhan muat.

Pada permenperdag tersebut ditetapkan, pengaturan impor berlaku mulai 15 Desember 2008. Namun, pemberlakuan aturan itu ditunda menjadi 1 Februari 2009 dengan diterbitkannya

Permenperdag No 52/2008, akhir pekan lalu. Menurut Mari, penundaan itu diputuskan untuk menghindari penumpukan barang di pelabuhan akibat meningkatnya arus barang bersamaan dengan libur akhir tahun.

Penundaan juga dilakukan karena mempertimbangkan kesiapan importir dan surveyor serta perlunya klarifikasi identitas nomor harmonized system (HS).

"Setelah kami mencermati lagi dan menanyakan kepada pihak-pihak yang mengimplementasikan di lapangan, ternyata aturan ini sudah siap dilaksanakan 1 Januari 2009 jika tidak dilakukan pre-shipment inspection (verifikasi di pelabuhan muat)," ujarnya.

Pengecualian

Terkait dengan hasil koordinasi itu, Menperdag menetapkan pengaturan impor dimulai 1 Januari 2009, tetapi tidak disertai kewajiban verifikasi bagi alas kaki, elektronik, mainan anak, makanan, dan minuman.

Verifikasi bagi empat jenis produk baru diwajibkan mulai 1 Februari 2009. Untuk garmen, verifikasi berlaku mulai 1 Januari 2009 karena ketentuan ini sudah diterapkan sejak 2005.

Selain mengubah waktu, pemberlakuan Revisi Permenperdag No 52/2008 tentang Perubahan Permenperdag No 44/2008 akan menegaskan pula pengecualian bagi importir produsen, importir yang berfasilitas jalur prioritas, serta klarifikasi identitas nomor HS.

Terkait dengan tuntutan sejumlah daerah di perbatasan yang ingin menyertakan pelabuhan mereka sebagai pintu masuk impor produk ini, Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi mengatakan, sampai kini hanya lima pelabuhan yang disebutkan pada permenperdag yang memenuhi syarat untuk perdagangan internasional.

Menurut ekonom Faisal Basri, revisi permenperdag yang baru berumur tiga hari itu menunjukkan bahwa pemerintah mendengar suara dunia usaha justru setelah kebijakan dibuat.

"Seharusnya suara dunia usaha didengar sebelum memutuskan suatu kebijakan. Tetapi, ya ini lebih baik daripada keukeuh mempertahankan kebijakan yang keliru," ujar Faisal. (Kompas)

3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Segera Terbentuk

Bank Indonesia dapat menempatkan dana di LPEI

UNDANG-undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) disahkan hari ini. Lembaga pembiayaan ekspor pun segera terbentuk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan membentuk lembaga ini paling lambat bulan setelah UU LPEI disahkan. Pemerintah akan menempatkan modal awal Rp4 triliun pada lembaga itu. Aset lembaga pembiayaan ekspor itu diprediksi mencapai Rp29,7 triliun dalam enam tahun ke depan.

"Itu artinya bisnis tumbuh 15-20 persen setiap tahun. Aset LPEI saat ini Rp14 triliun hingga pembiayaan awal bisa mencapai Rp12 triliun," kata dia di sela-sela Rapat Panitia Khusus RUU LPEI di Jakarta, Senin (15/12).

Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi cikal bakal berdirinya Lembaga Pembiayaan Ekspor. Pemerintah akan mendirikan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dengan nama Indonesian Eximbank.

Dia menjelaskan, pemerintah siap menambah modal lembaga pembiayaan ekspor bila modalnya menurun hingga di bawah Rp4 triliun. Dana itu akan diambil dari dana cadangan umum atas persetujuan DPR. "Dengan situasi perekonomian dunia seperti saat ini, target pembiayaan ekspor yang ditetapkan tidak mudah. Kami perlu melihat lagi rencana kerja LPEI," ujar dia.

Menkeu menambahkan, Bank Indonesia dapat menempatkan dana di LPEI seperti tertuang dalam Pasal 22 UU LPEI. Kebijakan itu akan menghindarkan lembaga pembiayaan ekspor itu dari kesulitan permodalan.

Lembaga itu juga dapat memanfaatkan pendanaan melalui penerbitan surat berharga atau obligasi, pinjaman dari pemerintah asing, lembaga multilateral, serta perbankan dan lembaga keuangan domestik.

Indonesia Eximbank akan memprioritaskan pembiayaan ekspor untuk pelaku usaha bidang manufaktur dan pertanian. Kedua sektor itu tergolong paling banyak menyerap tenaga kerja.

Kegiatan ekspor seperti di negara-negara lain umumnya ditopang lembaga khusus seperti Credit Export Agency. Selain kepada eksportir di dalam negeri, dukungan juga diberikan kepada importir di luar negeri.

Peran lembaga serupa di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang sangat besar untuk mendorong kinerja ekspor dan kegiatan investasi. Modalnya sepenuhnya dari pemerintah. (Jurnal Nasional)

C. SOSBUD

1. Mengunjungi “Kantor Kelurahan”

“Lihat sendirilah, tidak semua perwakilan Indonesia megah. Di Vanimo, konsulat kita seperti kantor kelurahan.” Kata-kata Direktur Informasi dan Media, Suhardjono tersebut terngiang-ngiang di telinga, saat SH mendapat undangan Departemen Luar Negeri mengunjungi Papua sekaligus mampir di Konsulat RI Vanimo, Papua Nugini .

Memang, kantor perwakilan yang terletak dekat perbatasan RI-Papua Nugini tersebut tampak seperti rumah biasa. Yang membedakannya adalah lambang Garuda Pancasila di pintu gerbang serta bendera merah putih di halamannya. Di halaman depan ada sebuah kapal bertuliskan

“Vanimo Indonesian Consulate”. Bangunan dibagi dua, kantor dan rumah tamu, yang menjadi tempat tinggal diplomat Indonesia beserta stafnya. Beberapa ekor anjing herder ikut menjaga kantor.

KRI Vanimo dibuka tanggal 29 Oktober 1992 dengan tujuan meningkatkan hubungan persahabatan kedua negara, terutama dalam menciptakan iklim kerja sama yang saling menguntungkan. Konsulat terletak di Provinsi Sandaun, provinsi terbesar ketiga di Papua Nugini.

Nama Sandaun diambil dari bahasa Pidgin Sun Down yang artinya matahari terbenam, karena terletak paling barat dari seluruh wilayah PNG..

Tidak seperti perwakilan Indonesia lainnya di luar negeri, diplomat dan staf KRI Vanimo tidak diperkenankan membawa keluarga. Ruang tengah rumah tamu menjadi aula serbaguna untuk berbagai acara.

“Hiburan di sini adalah ke perbatasan untuk menelepon keluarga,” kata Sutarwindargo, pelaksana Konsul RI Vanimo. Perbatasan yang dimaksud adalah perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung. Di Vanimo, telekomunikasi seluler masih sulit. Dari dua provider yang ada, hanya satu yang bisa digunakan untuk mengirim pesan singkat (SMS). Jaringan telepon seluler Indonesia yang menjangkau hingga perbatasan hanyalah Telkomsel yang sinyalnya segera menghilang setelah kita meninggalkan perbatasan.

Menanti Yudhoyono untuk melintasi perbatasan RI-PNG di Skouw, setiap WNI diwajibkan membawa paspor dan melapor ke kantor imigrasi yang letaknya sekitar 200 meter dari perbatasan. Sebaliknya warga PNG bebas melintas perbatasan. Menurut Sutar, hal ini disebabkan daerah perbatasan tersebut adalah tanah adat Suku Wutung. Banyak tanah pertanian mereka yang terletak di wilayah Indonesia.

Dekat perbatasan terdapat pasar yang ramai setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Warga PNG membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Para pedagang di pasar tersebut umumnya berasal dari Bugis. Alat pembayaran yang digunakan adalah kina, mata uang PNG. Satu kina saat ini bernilai sekitar Rp 4000.

Perbatasan Skouw dapat dicapai dengan jarak perjalanan sekitar satu setengah jam dari Jayapura. Namun sayang, perbatasan tersebut belum dapat dilintasi kendaraan, karena belum ada kesepakatan penuh soal perbatasan. Rencananya, perbatasan akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Papua Nugini tahun 2005. Namun karena kepadatan jadwal kedua kepala negara, hingga kini perbatasan tersebut belum dibuka.

“Menurut rencana, Februari 2009 perbatasan akan resmi dibuka,” kata Sutar.

Menurut data Konsulat, sekitar tahun 1970-an dan 1980-an terjadi eksodus masyarakat Papua ke PNG. Akibatnya, di distrik Vanimo masih ada beberapa kantong penampungan warga Papua, seperti di Black Wara, Waromo, Bewani dan Amanab. Warga Papua yang tinggal di Vanimo bervariasi, ada yang garis keras anti-RI dan ada kelompok yang tinggal dan hidup di PNG akibat ikatan kekeluargaan, misalnya perkawinan.

Yang menarik, ada seorang mantan gubernur Sandaun yang melamar menjadi caleg sebuah partai di Papua. Namun ditolak karena masih berkewarganegaraan PNG. Keadaan alam provinsi Sandaun sebagian besar tertutup hutan tropis. Potensi sumber daya alam dan mineral masih belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan modal dan sumber daya manusia.

Penerimaan pendapatan daerah terbesar saat ini adalah hasil penjualan kayu. Perusahaan asing yang beroperasi di Vanimo berasal dari Malaysia. Yang terbesar adalah Vanimo Forest Product PTY Ltd. Kontrak perdagangan langsung antara pengusaha Papua dan Sandaun belum

terrealisasi. Vanimo Free Trade Zone telah dicanangkan sejak tahun 1996, hingga kini pun belum terwujud akibat belum ada perangkat yang mengaturnya.

Pusat perekonomian Sandaun di Vanimo terdapat di pusat kota dengan pasar tradisional dekat Pantai Dasi dan dua blok supermarket. Jangan bayangkan seperti supermarket di ibu kota.

Pasar swalayan di Vanimo mirip gudang pelabuhan. Pasar hanya ramai oleh pekerja perusahaan kayu yang membelanjakan uang setelah mendapat gaji per dua minggu.

"Biasanya mereka kemudian mabuk-mabukan di luar sana," kata Sutar. Tahun 2006 pernah ada pemabuk yang masuk ke konsulat. (Sinar Harapan)

D. HANKAM :

1. Indonesia-AS Tukar Pikiran Soal Perencanaan Pertahanan

Amerika Serikat berusaha menunjukkan sikap baik kepada Indonesia. Pada Senin (15/12), Departemen Pertahanan AS memberikan pengetahuan terkait perencanaan pengelolaan sumber daya pertahanan yang merupakan bagian dari program pelatihan Defence Resource Management Study (DRMS).

"Sejak tahun 2006, Pemerintah RI, dalam hal ini Dephan, dan pemerintah Amerika menyepakati kajian yang komprehensif mengenai proses-proses pengelolaan sumber daya pertahanan melalui program DRMS," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Senin (15/11).

Pelatihan itu, sambung Menhan, diikuti oleh perwira menengah yang bertanggung jawab dalam persoalan perhitungan anggaran dari semua angkatan beserta staf perencanaan dari lingkungan Dephan. Ini merupakan kali kedua setelah digelar pada tahun 2006 lalu. Secara umum, ia menjelaskan pelatihan yang diberikan tersebut untuk membimbing para perwira membuat perhitungan dari kebutuhan yang diperlukan sesungguhnya.

"Tim ahli Amerika yang berlatar belakang keahlian di bidang pengelolaan sumber daya pertahanan bersama sejumlah perwira Dephan dan TNI telah melakukan assesment, kajian dan evaluasi terhadap proses pengelolaan sumber daya pertahanan di dephan dan TNI dengan menggunakan teknik manajemen modern," ujarnya.

Terkait perencanaan pertahanan, sesuai dengan perencanaan Tri Matra Terpadu, Menhan menjelaskan jika prioritas anggaran akan diberikan kepada Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Hal ini terkait kebutuhan penyediaan peralatan yang lebih canggih untuk mendukung tugas dan gerak kedua angkatan. Sementara, terhadap Angkatan Darat, prioritas pengadaan lebih diarahkan dalam peningkatan kemampuan personel.

"Sesuai dengan perencanaan tri matra terpadu, diantara ketiga angkatan, prioritas kredit ekspor lebih banyak kepada AU dan AL. Ini karena kita perlu peralatan yang canggih dan mahal," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Rencana Pertahanan Dephan Laksamana Muda Gunadi menyatakan teori yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak akan seratus persen diserap oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi yang dimiliki oleh Indonesia, terutama persoalan teknologi, tidak sama persis dengan yang dimiliki Amerika.

"Kita sudah punya teori (perencanaan), tapi mereka punya teori lain yang lebih praktis karena didukung dengan teknologi informasi. Kita tidak akan 100% menggunakan teori itu, akan kita kembangkan dan modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada," sahutnya. (Media Indonesia)

E. HUKUM :

1. DPR Sahkan RUU Minerba pada Selasa

Sidang Paripurna DPR pada Selasa dijadwalkan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang telah dibahas bersama pemerintah sejak 4 Juli 2005.

Anggota Pansus RUU Minerba DPR, Yasin Kara, di Jakarta, Selasa, mengatakan, sidang hanya tinggal mengesahkan kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan tingkat satu antara Pansus RUU Minerba DPR dan pemerintah.

"Jadi, sidang paripurna ini hanya mengesahkan saja apa yang sudah dicapai dalam rapat pansus dengan pemerintah. Kalaupun ada keberatan, kemungkinan hanya catatan-catatan saja," katanya.

Yasin yang berasal dari Fraksi PAN DPR itu mengatakan, pihaknya akan menyampaikan catatan, terutama pada bab yang membuat ketentuan peralihan.

FPAN, lanjutnya, menginginkan agar ketentuan mengenai jangka waktu dan luasan tambang dari kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang saat ini masih berjalan, sudah harus disesuaikan setahun setelah diundangkan.

Sesuai bab mengenai ketentuan peralihan dalam RUU Minerba itu, maka KK dan PKP2B wajib menyesuaikan dengan UU selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkan.

Dengan demikian, perusahaan pemegang KK dan PKB2B di antaranya akan terkena kewajiban membayar dividen 10 persen dari keuntungan bersih serta wajib mengikuti pasal penghentian sementara, pencabutan izin, pemanfaatan potensi dalam negeri dan batasan luas produksi.

Sesuai ketentuan peralihan maka pemegang KK juga wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Sedang bagi permohonan KK dan PKP2B yang telah diajukan ke Menteri paling lambat satu tahun sebelum UU Minerba berlaku dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan umum, dapat memperoleh izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa melalui lelang.

Sebelumnya, pada 11 Desember lalu, rapat kerja Pansus RUU Minerba DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang beragendakan pemandangan fraksi mini, menyepakati RUU Minerba.

Sebanyak 10 fraksi yang memberikan pandangan dalam raker tersebut, menyatakan persetujuan atas seluruh pasal yang ada di RUU Minerba.

UU Minerba akan mengganti UU No 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. (Republika Online)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Pemerintah Diminta Antisipasi Penerapan "Lacey Act" Amerika

GREENOMICS Indonesia meminta agar pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, segera ambil langkah konkrit untuk mengantisipasi pemberlakuan "Lacey Act" oleh Pemerintah Amerika Serikat mulai tahun 2009.

"Lacey Act" adalah peraturan yang memperketat importasi produk-produk kayu atay produk berbahan baku kayu dari Indonesia ke Amerika Serikat.

"Jika tidak ada langkah antisipasi khusus, maka krisis keuangan AS dan pemberlakuan Lacey Act tersebut akan memberi dampak signifikan terhadap kinerja ekspor produk kayu/berbahan baku kayu Indonesia," kata Vanda Mutia Dewi, Koordinator Nasional Greenomics Indonesia, di Jakarta, Senin.

"Lacey Act" ini berupa Undang-undang Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk memerangi praktik pembalakan liar dengan mengatur larangan terhadap perdagangan produk berbahan baku ilegal, termasuk produk kayu/berbahan baku kayu.

Pemberlakuan Lacey Act terhadap produk kayu/berbahan baku kayu mewajibkan para eksportir dan importir membuat dokumen deklarasi yang meliputi informasi tentang nama spesies kayu yang digunakan, negara asal sumber bahan baku kayu, jumlah kubikasi dan ukuran kayu yang digunakan, serta nilainya.

"Pemerintah harus responsif, jangan sampai nanti mengambil kebijakan-kebijakan kepepet ketika pemberlakuan Lacey Act sudah di depan mata. Perlu diingat, awal April adalah pemberlakuan Lacey Act untuk seluruh produk-produk kayu/berbahan baku kayu, dan pada Juli 2009 akan dikenakan terhadap produk kertas dan turunannya," ujar Vanda.

Ia mengemukakan, setidaknya ada empat langkah yang perlu dilakukan pemerintah.

"Pertama, melakukan konsultasi teknis kepada Kedubes AS di Indonesia tentang kemungkinan penerapan batasan-batasan kayu legal berbasis hukum kehutanan RI.

Langkah kedua adalah dengan pemerintah RI melalui duta besar perdagangannya di WTO perlu berkonsultasi dengan WTO tentang batasan-batasan penerapan Lacey Act dalam konteks perdagangan internasional.

Ketiga, masih kata Vanda, Departemen Kehutanan perlu menyiapkan satu paket Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yang merangkum seluruh aturan pelaksanaan yang terkait dengan legalitas kayu yang dapat dijadikan acuan utama dalam proses konsultasi terkait dengan pemberlakuan Lacey Act.

Keempat, pemerintah perlu menggarisbawahi bahwa karakteristik Lacey Act adalah berbasis fakta, bukan berbasis dokumen.

"Sehingga, dokumen-dokumen legalitas kayu yang tidak didukung fakta, bisa berakibat produk-produk kayu/berbahan baku kayu RI tidak bisa masuk pasar AS," katanya.

Berdasarkan data Departemen Perdagangan, pada tahun 2007 terdapat tiga komoditi utama ekspor produk kayu RI ke pasar Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai 242,2 juta dolar Amerika.

Sedangkan ekspor produk kertas RI ke Amerika Serikat tercatat sebesar 193,4 juta dolar Amerika.

"Jadi, total nilai ekspor produk kayu/berbahan baku kayu (termasuk produk kertas) ke pasar Amerika Serikat mencapai 435,6 juta dolar Amerika pada tahun 2007, atau sebesar 6,94 persen dari total nilai ekspor produk kayu/berbahan baku kayu Indonesia," kata Vanda. (Jurnal Nasional)

III. ARTIKEL

:

1. Annapolis has made peace impossible (by Nicola Nasser)

Palestinian -- Israeli peace-making can only deliver if Palestinians are united, but the current Annapolis "peace process" was launched first of all as a blueprint for perpetuating the inter-Palestinian divide.

Commitment or non-commitment to what the Quartet of the U.S., EU, UN and Russian mediators in Middle East peace -- making described as the "Annapolis Process" in a statement they released after their meeting in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh on Nov. 8 has become the terms of reference to make or break the Palestinian unity of ranks, which has so far failed the Egyptian mediation efforts, the latest in a series of national, Arab and non-Arab similar reconciliation endeavors.

The Annapolis conference, which was hosted by the United States in Maryland on Nov. 27, 2007 and attended by all members of the League of Arab States, convened with much fanfare and re-launched the Palestinian -- Israeli negotiations after a seven -- year interruption since the collapse of the trilateral Camp David summit with the U.S. in 2000.

In Annapolis, Arab leaders and the Palestinian presidency were lured by a promise of a Palestinian state by the end of 2008 and a wider Arab -- Israeli peace process, mainly on the Syrian track thereafter, to coexist with the inter-Palestinian divide between the PLO -- led West Bank and the Hamas -- led Gaza Strip and to grudgingly hide their bitter resentment of the U.S. -- Israeli threat of siege, which had aborted Qatari, UAE, Saudi, Egyptian, Yemeni and other Arab and non -- Arab mediation efforts to unify Palestinian ranks.

The Annapolis plan to implement the first stage of the 2003 Road Map for a Palestinian -- Israeli political settlement has built on two pillars, the first a Palestinian -- Israeli security coordination that is solely and directly monitored by three senior U.S. generals, namely James Jones, William Fraser and Keith Dayton, and the second pillar is inter -- Palestinian divide between the PLO in Ramallah and Hamas in Gaza.

However, the failure of the "Annapolis process" could be better proved by the unmet deadline of 2008 and the un-honored promise of a Palestinian state, but the two pillars nonetheless survived the failure of Annapolis so far to perpetuate and exacerbate the Palestinian rift, with the security coordination raising accusations by Hamas of PLO collaboration with Israel and the divide developing into what threatens to become a permanent separation between the West Bank and Gaza.

There remain too at the core of the Annapolis process and at the heart of the Palestinian divide the three Israeli -- U.S. "good conduct" preconditions that qualify Palestinians to be partners to peace negotiations as well as to evade military siege, economic blockade and diplomatic isolation, namely to unilaterally renounce violence without any guarantees of Israeli reciprocity, recognize the existence of the state of Israel without any Israeli reciprocal recognition

of the state of Palestine, and commitment to the accords signed by the PLO with Israel regardless of Israeli reciprocal respect thereto.

Israel's lack of reciprocity has come recently under spotlight by the refusal of the U.S. State Department to publish a report by its Middle East security envoy General James Jones on Palestinian -- Israeli security, which the Israeli newspaper *Haaretz*, quoted by *AFP* on Nov. 26, described in August as "an extremely critical report of Israel's policies" in the West Bank and Gaza Strip."

It is now public knowledge that the Palestinian partner to the Annapolis process, represented by the President Mahmoud Abbas -- led Palestine Liberation Organization (PLO) and the autonomous Palestinian Authority (PA), are wholeheartedly committed thereto irrespective of any Israeli reciprocity.

The emergency meeting of the Arab foreign ministers in Cairo on Nov. 26 concluded similarly committal, encouraged beforehand to let go the undelivered promises of the Annapolis conference by indications floated by both the Israeli President Shimon Peres and the U.S. President -- elect Barak Obama's team of their willingness to deal with the collective Arab peace initiative.

Hamas is consequently left in the cold to fend off a Palestinian and Arab diplomatic isolation as much as to survive the Israeli ongoing economic blockade and military siege, "hopefully" to gradually be finished off or alternatively to surrender to those same three preconditions to which its Palestinian rival had subscribed to as early as the Oslo accord was signed with Israel in Washington D.C. in 1993.

More out of presuming the weakness of Hamas than out of feeling a strength in his own position, but stiffening his back with the U.S. and Israeli determination to push hard with their three pre-qualifications, President Abbas feels safe enough to persistently reiterate his commitment to Annapolis and to corner the besieged Islamic movement to either dismantle voluntarily or otherwise being swept away in a way or another, and he is on record as saying that the end of the "black coup d'etat" in Gaza in June 2007 is only a matter of time.

However the end game of the Annapolis process is still far away from being the only game in the town as it is held hostage to Hamas' fate as much as it has cornered Hamas, but meanwhile this process remains the detrimental factor that makes or breaks the unity of Palestinian ranks, as long as both Palestinian protagonists continue to risk it out in their brinkmanship policies. (The Jakarta Post)

2. Zero Toleransi Melamin, Nonsens (Oleh Mangku Sitepoe)

Menteri Kesehatan RI menyatakan para menteri kesehatan ASEAN dan China sepakat tidak dapat menoleransi melamin pada setiap produk makanan (Sinar Harapan 27 November 2008).

Dengan perkataan lain zero toleransi melamin atau tidak mengandung melamin sama sekali pada semua produk makanan.

Sedangkan China melalui CCDCP (Chinese Center for Disease Control and Prevention), 2008 menetapkan TDI (tolerable daily intake) bagi susu formula anak-anak di bawah umur tiga tahun adalah 0,32 mg/kg per kg berat badan. Badan pengawasan obat dan makanan Amerika Serikat (FDA) 2007: TDI melamin bahan makanan yang dikonsumsi adalah 0,63 mg/kg per kg berat badan.

TDI susu formula maupun bahan makanan yang dikonsumsi menunjukkan adanya toleransi melamin terhadap bahan makanan atau masih diizinkan keberadaan melamin dalam bahan makanan yang akan dikonsumsi. Maka pernyataan Menteri Kesehatan masih perlu dipertanyakan.

Dalam keadaan normal melamin dijumpai pada bahan baku pakan dan pellet pakan, pada bahan pangan dari produk hewani, telur, daging dan susu, dalam air serta dari hasil industri seperti alat dapur dari plastik, pestisida, pupuk, disinfektan, dll. Keberadaan melamin dalam pakan dijumpai pada peristiwa ratusan anjing dan kucing mati di Amerika Serikat sejak Maret 2007 sesudah mengonsumsi pet food (pakan hewan peliharaan - anjing dan kucing) yang diimpor dari China tercemar melamin.

Penambahan melamin dimaksudkan dengan sengaja untuk menambah kadar "protein palsu" dari bahan pakan yaitu menambah nilai dari N (nitrogen) yang dipergunakan sebagai parameter penambahan "protein palsu". Penambahan melamin ke pakan secara disengaja berdalih meningkatkan kualitas pakan tidak dibenarkan. Yang ini boleh dinyatakan sebagai skandal penipuan.

Jangan Menyalahkan Peternak

Skandal berlanjut ke susu formula bagi bayi ketika melamin dijumpai bersama tepung susu.

Susu bubuk yang dikonsumsi sampai 22 September 2008 telah mengambil korban sejumlah 53.000 bayi, 14.000 dirawat dan empat orang meninggal. Pemberitaan luar negeri menyatakan penambahan melamin dilakukan oleh para peternak/pengusaha ke dalam susu segar sehingga dalam pembuatan susu bubuk atau susu formula “kadar protein palsu” bertambah.

Saya kurang sependapat dengan menyalahkan peternak sebagai pencetus skandal melamin, sebab salah satu susu bubuk formula yang diimpor dari China berkadar melamin: 619 mg/kg atau 619 ppm. Padahal, untuk membuat susu bubuk 1 kg diperlukan 8 liter susu segar, sehingga kadar melamin susu segar: $619:8 = 77,38$ ppm. Atau harus ditambahkan 77,38 mg melamin ke dalam 1 liter susu cair.

Sedangkan melamin tidak larut di dalam air sehingga penambahan melamin ke dalam susu yang telah berbentuk bubuk kemungkinannya dilakukan oleh perusahaan pembuat susu bubuk.

Skandal susu bermelamin oleh perusahaan produsen susu formula bukan oleh peternak.

Tetapi, peternak tanpa disengaja dapat menghasilkan susu, daging dan telur bermelamin merupakan bagian dari nonzero melamin toleransi.

Dalam rumen sapi dijumpai mikroorganisme bersifat tumbuh-tumbuhan yang memerlukan pupuk nitrogen (N) dalam pertumbuhannya, dapat diberikan berupa pupuk melamin. Melamin dicampur dengan urea dan molase diberikan kepada sapi sebagai feed additive.

Mikroorganisme disintesa menjadi protein yang akan menambah protein yang diserap oleh tubuh. Melamin tidak seluruhnya disintesa menjadi protein oleh mikroorganisme, tetapi sebagian dari melamin diserap oleh tubuh dalam bentuk melamin asli yang diekskresikan melalui urine dan melalui susu sapi yang diperah.

Seperti Keracunan Jengkol

Pemberian pupuk melamin ke dalam perut sapi dapat menghasilkan nonzero melamin toleransi. Demikian pun pemberian pakan sapi wheat gluten dan rice gluten, pellet dan air dapat menghasilkan nonzero melamin toleransi.

Pencemaran melamin pada susu segar yang dihasilkan oleh sapi akibat pemupukan perut sapi dengan melamin, pemberian pakan dan air bermelamin bukan suatu kesengajaan. Susu segar yang bermelamin ini dijadikan susu bubuk formula bukan suatu skandal.

Kadar melamin susu bubuk formula 2,563 mg/kg masih ditoleransi oleh China State Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine (SAQSTQ) pada 8 Oktober 2008. Maka zero melamin toleransi produk hewani kelihatannya akan mengalami kesukaran dalam aplikasinya.

Gejala intoksikasi melamin pada bayi adalah gangguan ginjal dan batu ginjal yang disebut acute renal failure (ARF) akibat mengonsumsi melamin dalam susu formula di atas ambang TDI (tolerable daily intake). Gejala mulai muncul sesudah berbulan-bulan mengonsumsi melamin.

Gejala adanya iritabilitas, gelisah, sakit perut yang disebut kolik renalis, oligo uri bahkan anuri. Pengobatan di samping pengobatan gejala bahkan dioperasi tetapi terapi khusus memberikan cairan bersifat basa misalnya bikarbonas natrikus. Intoksikasi melamin dapat juga terjadi pada kucing dan anjing.

Keracunan jengkol di Indonesia 5-12 jam sesudah memakan jengkol tua dengan gangguan ginjal dan adanya batu ginjal dari asam jengkolat juga disebut acute renal failure. Gejala sukar kencing, semula sedikit kencing kemudian tidak dapat buang air kecil, juga adanya kolik renalis.

Pengobatan diberikan bikarbonas natrikus yang bersifat basa beberapa waktu kemudian dapat buang air kecil.

Sebagai dokter hewan, saya mendapatkan pasien, yakni seekor monyet peliharaan yang diberi makan jengkol tua. Sehari sesudah makan jengkol, monyet itu menjerit-jerit kesakitan sambil mengisap-ngisap penisnya. Langsung diberi bikarbonas setengah jam kemudian si monyet mulai tenang. Saya tidak bisa memastikan, apakah kesembuhan disebabkan oleh bikarbonas natrikus atau self medication dengan meminum urine sendiri?

Selama sapi memakan pakan dan meminum air, zero melamin toleransi tidak akan dijumpai. Dari sudut pandang epidemiologi keracunan melamin identik dengan keracunan jengkol di Indonesia. (Sinar Harapan)

3. Indonesia can face this crisis with confidence (by Johannes Simbolon)

As a country which managed to weather a terrible economic crisis less than a decade ago, Indonesia should be able to face the current one with self-confidence.

Looking around, we may see many reasons to worry nowadays. No day has passed without bad economic tidings.

Lehman Brothers went bankrupt; stock markets around the world crashed; the U.S. government wrangled with bailing out Citigroup and the Big Three (Ford, Chrysler and General Motors), erstwhile icons of U.S. economic might. All these companies are giants, older than the Republic of Indonesia. Still, they could not withstand the perfect storm called the global financial crisis.

The list of victims has been long and continues to grow. At least four countries -- Hungary, Iceland, Ukraine and Pakistan -- have asked for bailouts from the International Monetary Fund (IMF). Many rich countries are now in recession, having experienced negative growth for two consecutive quarters, including Singapore and Japan, our largest trading partners.

In Indonesia, although most experts project the country will not see the brunt of the crisis until next year, some sectors of the economy have started feeling the effects.

The fall in commodity prices has caused misery in the crude palm oil (CPO) producing regions of Sumatra and Kalimantan, which were enjoying windfall profits until the middle of this year. Businesses have slumped in the regions and there have been reports of farmers committing suicide.

No massive job cuts have hurt Jakarta or other industrial cities as yet, but some multinational companies have laid off workers as part of their global retrenchment. The Manpower and Transmigration Ministry said late last month registered companies have thus far cut 2,000 jobs, but tens of thousands of workers are expected to lose their jobs in the coming months as firms make plans to cut more than 40,000 positions.

Experts paint a bleaker outlook. They are warning millions of people could lose their jobs in labor-intensive sectors such as the garment, textile and footwear industries.

Despite the gloomy outlook, there are reasons for optimism.

First, the government and economists predict Indonesia's economy will still grow next year albeit at a slower pace. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati projects national growth at around 5 percent, while local economists paint a brighter picture. Faisal Basri, for example, is estimating growth at 5.9 percent, slightly under this year's figure. Foreign economists are generally less optimistic: The Economic Intelligence Unit (EIU) is projecting only 3.7 percent growth.

This could be either bad enough or good enough. Bad enough because, at 3.7 percent growth, Indonesia will not be able to absorb into its workforce current jobseekers and new people coming into the job market next year. Good enough because it's not as bad as some, if we compare that projection with the negative growth other countries may experience next year or the 13.7 percent contraction Indonesia experienced in 1998, the first full year of the previous crisis.

Second, while some companies are now far out on the limb because they relied heavily on loans to run their businesses or boost their stock performances, quite a number of Indonesian companies are still in good shape, analysts say. Many are flush with cash accumulated during the recent commodity boom or through prudent financial management. Many learned a hard lesson during the previous crisis so they have used loans judiciously in their business operations.

These healthy firms include the 31 companies (10 state-owned, 21 private) which are now participating in the Indonesian Stock Exchange's share buyback program and those which, despite the crisis, are taking bold measures to expand their business through acquisitions and by opening new operation lines.

In contrast, during the previous crisis, most Indonesian big companies went bust because they had incurred massive debt, then were taken over by the government before being sold to foreign investors at fire-sale prices.

Third, compared to many other nations, we are better prepared to face the crisis mentally and emotionally because we still have our battle scars from the far worse 1997-2001 crisis.

Indonesia's 1997-2001 crisis was probably the worst to strike a nation in modern history. Our crisis was not only financial but a calamitous combination of economic and political mayhem. The crisis in the economic sector sent political life into a tailspin. The political turmoil then aggravated the economic problems, causing more chaos in social and political life.

At the time, we saw Jakarta burned by mobs, thousands of people killing each other in many parts of the country, millions losing jobs, people dying of hunger. I myself will never forget the day a man walking down the street in my neighborhood suddenly collapsed. He had not eaten for three days.

While other people learn about the Great Depression only from history books, all of us have had hands-on experience with a multidimensional crisis. We coped and the painful learning process should make us now more resilient and stronger as we face the current woes.

If an economic crisis is comparable to a trip to hell, we have been to the lower circles. And we survived.

As long as next year's general election does not turn violent and messy, I am not so worried. Are you? (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. Teror atas Hubungan India-Pakistan

Sensitivitas ketegangan hubungan India-Pakistan cenderung meningkat dan bertambah rumit sebagai komplikasi atas ancaman bahaya terorisme.

Upaya memperbaiki hubungan kedua negara, yang bermusuhan atas perebutan wilayah Kashmir sejak berpisah tahun 1947, menjadi semakin sulit pula.

Aksi teror yang dilancarkan kaum fundamentalis dari wilayah Pakistan ke Mumbai, India, bulan lalu, misalnya telah memperburuk hubungan. Sejak akhir pekan lalu, kedua negara berusaha memperbaiki hubungan untuk mencegah konfrontasi militer secara terbuka setelah kasus Mumbai, yang menewaskan 171 orang.

Ketegangan hubungan, sekurang-kurangnya untuk sementara, membaik. Namun, kerawanan hubungan belumlah selesai. Kasus Mumbai sendiri masih meninggalkan trauma, lebih-lebih bagi India. Masih dibutuhkan waktu untuk pemulihan.

Pada permukaan, situasi panas sudah mereda. Namun, pada lapisan yang lebih dalam, hubungan kedua negara masih menyimpan persoalan yang sangat serius. Kerawanan hubungan antara lain sangat bergantung pada kemampuan mengendalikan ancaman teror dari kaum fundamentalis.

Perlu dikemukakan, Pakistan sampai sekarang kewalahan menghadapi ancaman kaum fundamentalis yang berkolaborasi dengan jaringan Al Qaeda. Pakistan sendiri berkali-kali menghadapi serangan bom bunuh diri yang dilakukan kaum ekstremis. Sudah terbayang pula kesulitan yang dihadapi Pakistan mengendalikan kaum ekstremis, yang ingin menyerang India.

Serangan ke Mumbai bulan lalu sekaligus memperlihatkan kegagalan Pakistan maupun intelijen India untuk mengantisipasi dan mencegah bahaya ancaman serangan kaum ekstremis yang berbasis di Pakistan. Kasus serangan itu sendiri sudah pasti hanya memperburuk hubungan India-Pakistan, yang terlibat dalam sengketa panjang atas wilayah Kashmir.

Mungkin karena bersinggungan dengan persoalan Kashmir, India sempat menuduh Pakistan dengan menyatakan aksi teror ke Mumbai dilakukan kaum ekstremis yang dibina intelijen Pakistan untuk merecoki Pemerintah India terkait persengketaan Kashmir.

Tuduhan itu dibantah Pakistan. Silang pendapat tidak berlanjut karena kedua negara dapat menahan diri. Perang pun dihindarkan bagi kedua negara yang pernah berkonfrontasi militer tahun 1948, 1965, dan 1971.

Sekalipun perang tidak pecah, kengerian sudah terasa karena kedua negara masing-masing memiliki sistem persenjataan nuklir yang sangat menakutkan kawan maupun lawan di tingkat regional maupun global. (Kompas)

Jakarta, 16 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu